

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun terkait Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 maka bentuknya berupa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah. Dan pada Pasal 23 ayat (2) bahwa Kepala Daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

II. GAMBARAN DAERAH

A. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak diantara 7°02'29" – 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10"– 108°25'42" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran;
 - Sebelah Selatan : Samudra Hindia;
 - Sebelah Barat : Kabupaten Garut
-

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl), secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000-2.500 meter di atas permukaan laut (dpl), dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl). Luas tanah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar ± 270.882 hektar.

B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Bahwa berdasarkan *Monografi Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.796.496 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 913.795 jiwa dan penduduk perempuan 882.701 jiwa.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019

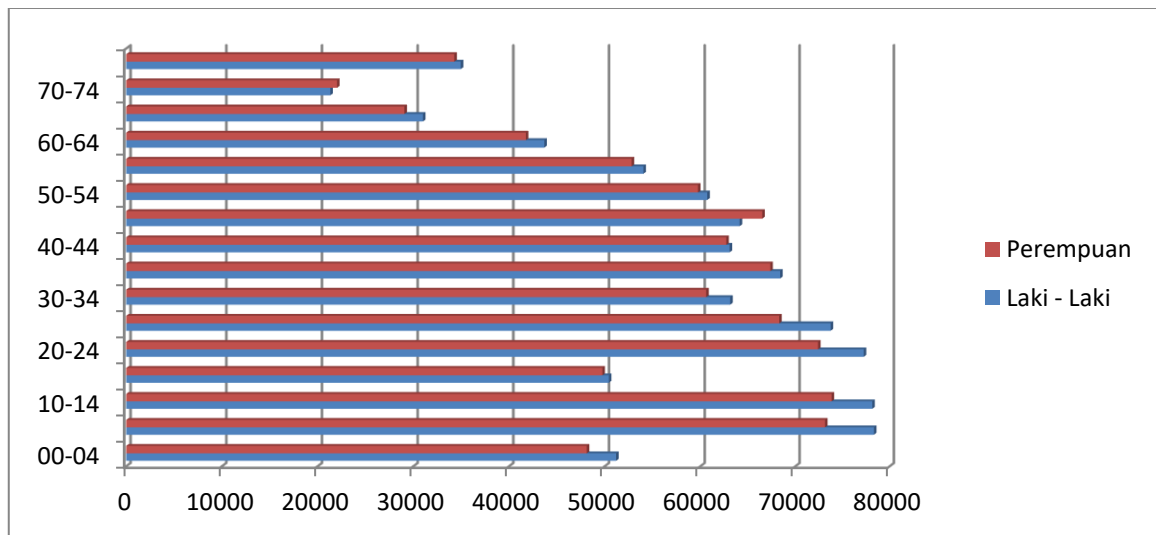
NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	CIPATUJAH	33.778	32.797	66.575
2	KARANGNUNGGAL	42.965	41.842	84.807
3	CIKALONG	32.009	31.596	63.695
4	PANCATENGAH	23.656	22.896	46.552
5	CIKATOMAS	25.445	24.330	49.775
6	CIBALONG	16.756	16.465	33.221
7	PARUNGPONTENG	18.222	17.491	35.713
8	BANTARKALONG	18.479	17.618	36.097
9	BOJONGASIH	10.420	9.919	20.339
10	CULAMEGA	12.735	12.066	24.801
11	BOJONGGAMBIR	20.484	19.643	40.127
12	SODONGHILIR	32.691	31.082	63.773
13	TARAJU	20.287	19.737	40.024
14	SALAWU	30.317	29.502	59.819
15	PUSPAHIANG	17.206	17.092	34.298
16	TANJUNGGAYA	22.239	21.626	43.865
17	SUKARAJA	26.345	25.189	51.534

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	SALOPA	24.521	23.447	47.968
19	JATIWARAS	26.376	24.927	51.303
20	CINEAM	16.861	16.970	33.831
21	KARANGJAYA	5.958	5.865	11.823
22	MANONJAYA	31.474	30.764	62.238
23	GUNUNGTANJUNG	15.685	14.696	30.381
24	SINGAPARNA	35.000	34.330	69.330
25	SUKARAME	20.669	19.834	40.503
26	MANGUNREJA	19.847	19.549	39.396
27	CIGALONTANG	38.047	35.998	74.045
28	LEUWISARI	20.631	19.917	40.548
29	SARIWANGI	17.987	17.119	35.106
30	PADAKEMBANG	20.421	19.906	40.327
31	SUKARATU	25.573	24.509	50.082
32	CISAYONG	30.170	29.108	59.278
33	SUKAHENING	15.875	15.611	31.486
34	RAJAPOLAH	25.008	23.972	48.980
35	JAMANIS	18.956	18.154	37.110
36	CIAWI	32.446	31.573	64.019
37	KADIPATEN	19.222	17.822	37.044
38	PAGERAGEUNG	29.386	28.469	57.855
39	SUKARESIK	19.558	19.270	38.828
	KABUPATEN TASIKMALAYA	913.795	882.701	1.796.496

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Selanjutnya dari grafik penduduk yang disusun berdasarkan kelompok umur 5 tahunan menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tasikmalaya termasuk penduduk muda. Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang grafik kelompok umur 05 - 09 tahun lebih panjang dari pada kelompok umur lainnya. Hal ini terlihat jelas dari Gambar Grafik Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 dimana bentuk grafiknya cenderung memanjang. Atau dapat diartikan juga, ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh penduduk usia produktif.

GAMBAR
GRAFIK PENDUDUK KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019*



III. VISI DAN MISI

A. VISI

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”.

B. MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul-karimah dan berkualitas.
2. Mewujudkan Perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

IV. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah maka digunakan indikator makro pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Adapun sebagai representasi ringkasan ketercapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 dituangkan dalam pencapaian indikator makro, sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL INDIKATOR MAKRO
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019**

No	Indikator	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Ket
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,00	65,64	
2	Indeks Pendidikan	58,43	58,68	
3	Indeks Kesehatan	75,32	75,71	
4	Angka Rata Rata Lama Sekolah	7,13	7,17	
5	Angka Harapan Lama Sekolah	12,48	12,52	
6	Usia Harapan Hidup	68,96	69,21	
7	Persentase jumlah penduduk miskin	9,85	9,12	
8	Indeks Pengeluaran	62,39	63,67	
9	Indeks Gini	0,353	0,310	
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,98	86,05	
11	Inflasi	2,30	1,72	
12	Pertumbuhan PDRB	5,70	5,43	
13	PDRB atas Dasar Harga Konstan	23.319.913,6	24.586.988,5	
14	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	33.970.204,2	37.218.870,5	
15	PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp)	12.938.947,60	13.950.996,39	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,23	66,66	
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,83	6,25	
18	Realisasi Investasi(Juta Rp)	137.957	898.361	

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya 2019 dan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya 2020

V. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan dasar Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	78,60 %
2.	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	67,80 %
3.	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	15,37 %
4.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75 %
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,70 %
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,55 %
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,017 %
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,125 %
9.	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	62,98 %
10.	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	49,97 %
11.	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	99,41 %
12.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %
13.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100 %
14.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,11 %
15.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	82,11 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

2. URUSAN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,016 %
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100 %
3.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	0,075 %
4.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,87 %
5.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96 %
6.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,60 %
7.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,18 %
8.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 %
9.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,75 %
10.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,04 %
11.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
12.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
13.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	78,48 %
14.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %
15.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	95,79 %
16.	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90,31 %
17.	Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	100 %
18.	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %
19.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	75

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	70,05 %
2.	Presentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/direkonstruksi	7,21 %
3.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Bukan Kewenangan Kabupaten
4.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Bukan Kewenangan Kabupaten
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	69,74 %
6.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	47,77 %
7.	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	53,33 %
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Bukan Kewenangan Kabupaten
9.	Rumah Tangga Bersanitasi	47,77 %
10.	Rumah tangga pengguna air bersih	78,72 %
11.	Kawasan Kumuh	0,02 %
12.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	24,64 %
13.	Rasion luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,07 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	100 %
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100 %
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	14,57 %

5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	43,17 %
6.	Rumah layak huni	85,43 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	29,03 %
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	49,23 %
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.338.045 orang
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.155 orang
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	18.225 orang
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	93,39 %
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit
8.	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	9,43 %

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya

6. URUSAN SOSIAL

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4	100 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 %
3.	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	0 %
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 %
5.	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	21,06 %

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya

VI. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2017, telah ditetapkan peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2017 bahwa Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat Status Sangat Tinggi (ST) dengan skor 3,2332 dan menduduki peringkat 23 Nasional.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

VII. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 (unaudited BPK RI)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	3,914,059,952,879.00	3,832,294,490,113.45	(81,765,462,765.55)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	267,426,198,085.00	288,290,693,896.00	20,864,495,811.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	67,052,357,509.00	74,270,569,778.00	7,218,212,269.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10,066,201,848.00	9,843,268,317.00	(222,933,531.00)

1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26,772,793,235.00	26,780,062,955.00	7,269,720.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163,534,845,493.00	177,396,792,846.00	13,861,947,353.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2,226,320,257,773.00	2,160,615,166,635.00	(65,705,091,138.00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71,949,360,000.00	57,273,053,225.00	(14,676,306,775.00)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,508,324,968,000.00	1,508,324,968,000.00	0.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	646,045,929,773.00	595,017,145,410.00	(51,028,784,363.00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,420,313,497,021.00	1,383,388,629,582.45	(36,924,867,438.55)
1.3.1	Pendapatan Hibah	189,960,280,000.00	190,338,920,840.45	378,640,840.45
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	150,448,125,121.00	142,797,736,155.00	(7,650,388,966.00)
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	658,077,512,800.00	628,098,842,465.00	(29,978,670,335.00)
1.3.4	Pendapatan Lainnya	0.00	325,556,022.00	325,556,022.00
1.3.5	Pendapatan Kepada Desa	390,088,434,100.00	390,088,429,100.00	(5,000.00)
1.3.6	Dana Insentif Daerah	31,739,145,000.00	31,739,145,000.00	0.00
2	BELANJA	4,085,999,370,033.00	3,793,953,584,480.00	(292,045,785,553.00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,299,573,872,669.00	2,161,509,659,423.00	(138,064,213,246.00)
2.1.1	Belanja Pegawai	1,450,360,330,367.30	1,363,770,494,730.00	(86,589,835,637.30)
2.1.2	Belanja Hibah	92,981,500,000.00	89,373,875,000.00	(3,607,625,000.00)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	13,047,200,000.00	5,767,750,000.00	(7,279,450,000.00)
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8,837,740,850.70	8,392,437,750.00	(445,303,100.70)
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Ka Desa dan Partai Politik	719,971,351,451.00	692,744,031,943.00	(27,227,319,508.00)
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	14,375,750,000.00	1,461,070,000.00	(12,914,680,000.00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,786,425,497,364.00	1,632,443,925,057.00	(153,981,572,307.00)
2.2.1	Belanja Pegawai		132,128,912,852.00	(10,756,538,707.49)

		142,885,451,559.49		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916,112,491,980.38	862,931,398,574.00	(53,181,093,406.38)
2.2.3	Belanja Modal	727,427,553,824.13	637,383,613,631.00	(90,043,940,193.13)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(171,939,417,154.00)	38,340,905,633.45	210,280,322,787.45
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	177,939,417,154.00	177,939,417,154.00	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	177,939,417,154.00	177,939,417,154.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)
	PEMBIAYAAN NETTO	171,939,417,154.00	173,939,417,154.00	2,000,000,000.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	212,280,322,787.45	212,280,322,787.45

Sumber : BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

VIII. INOVASI DAERAH

Inovasi menjadi salah satu komponen bagi pemerintah pusat dalam menentukan pemberian dana insentif daerah dan perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan inovasi daerah dengan tahapannya antara lain sosialisasi dan rapat koordinasi inovasi daerah.

Adapun terkait inovasi daerah di Kabupaten Tasikmalaya masih dalam proses uji dan pemetaan.

IX. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada masyarakat yang merupakan realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha serta peran aktif dan dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan Insan Pers.

Demikian RLPPD ini kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua.
Aamiin Yaa Rabbal A'lamiin.

Tasikmalaya, April 2020

BUPATI TASIKMALAYA



H. ADE SUGIANTO